

**EKSISTENSI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DAN
GAMBARAN KEMISKINAN KABUPATEN PATI**

**THE EXISTENCE OF WOMAN MIGRANT WORKERS AND
THE POVERTY PORTRAIT IN PATI DISTRICT**

Nurul Aeni

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Email : aeni_240884@yahoo.co.id

Naskah Masuk: 31 Oktober 2017 Naskah Revisi: 7 November 2017 Naskah Diterima: 13 November 2017

ABSTRACT

Indonesian migrant workers are dominated by women. It is an evidence of women participation in local development due to the remittance. This research aimed to describe the distribution of woman migrant workers in Pati District and to compare the poverty level between the subdistricts whose high concentration of woman migrant workers and their counterparts. It used qualitative research design with secondary data that were obtained from Employment and Transmigration Service as well as Local Development Agency of Pati District. The result of reserach were: (1) The growth of woman migrant workers in Pati District during 2015-2016 was 24%. They mostly works in domestic sector with the main destination country is Taiwan. The highest consentration of woman migrant workers was Sukolilo Subdistrict and the lowest's was Batangan Subdistrict. (2) Poverty is probably one of the international migration's triggers. The subdistricts with high concentration of woman migrant workes tend to have higher percentage of poor families compare to their counterparts.

Keywords: *pati district, poverty, woman migrant workers*

ABSTRAK

Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Kabupaten Pati didominasi oleh perempuan. Hal tersebut menjadi bukti peran serta perempuan dalam pembangunan daerah berkaitan dengan pengiriman remitan. Tujuan penelitian adalah menggambarkan persebaran buruh migran perempuan di Kabupaten Pati dan membandingkan kondisi kemiskinan di kecamatan dengan jumlah buruh migran perempuan terbanyak dan tersedikit. Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan data sekunder yang didapatkan dari Disnakertrans, Bappeda Kabupaten Pati serta referensi lain yang relevan. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pertumbuhan buruh migran perempuan di Kabupate Pati periode 2015-2016 adalah sekitar 24%. Sebagian besar buruh migran tersebut bekerja di sektor domestik dengan destinasi utama Taiwan. Konsentrasi buruh migran tertinggi berada di Kecamatan Sukolilo dan terendah di Kecamatan Batangan. (2) kemiskinan diindikasikan menjadi salah satu faktor yang melandasi keputusan menjadi buruh migran. Bukti akan hal tersebut adalah kecamatan dengan jumlah buruh migran perempuan banyak memiliki persentase keluarga miskin yang lebih tinggi.

Kata kunci: *kabupaten pati, kemiskinan, buruh migran perempuan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan bagi pembangunan di Indonesia. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau sekitar 10,86%. Selanjutnya berdasarkan persebarannya, terdapat kecenderungan ketimpangan kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan, dimana kemiskinan lebih banyak ditemukan di perdesaan dengan rasio sebesar 11:20 (BPS, 2016).

Ketimpangan persebaran kemiskinan di Indonesia merupakan indikasi timpangnya pembangunan antara kota dan desa sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi. Wilonoyudho (2009) menyatakan bahwa kesenjangan kesejahteraan kota-desa merupakan dampak penerapan konsep kutub pembangunan sejak pembangunan era orde baru. Industrialisasi dipandang sebagai strategi paling efektif untuk mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, dan pengangguran. Pengembangan industri pada umumnya diterapkan di perkotaan, sementara perdesaan yang identik dengan pertanian didorong untuk melaksanakan revolusi hijau. Revolusi hijau dengan penekanan intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian. Namun demikian, dampak negatifnya adalah tidak semua tenaga kerja pertanian terserap. Di sisi lain, industri yang diharapkan mampu menampung limpahan tenaga kerja dari perdesaan, hanya bersedia menerima tenaga kerja terampil.

Ketidaktersediaan lapangan kerja di perdesaan mendorong masyarakat desa mengembangkan strategi baru untuk

mendapatkan penghasilan, diantaranya dengan bekerja di daerah/negara lain atau migrasi (Ellis, 2000). Pada umumnya, migrasi adalah strategi bertahan hidup yang dipilih oleh generasi muda perdesaan karena sebagian dari mereka menganggap rendah pekerjaan sektor pertanian (Mukbar, 2009).

Pola migrasi yang dipilih oleh masyarakat pedesaan tidak hanya migrasi desa-kota atau urbanisasi melainkan migrasi lintas negara. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan jumlah buruh migran terbesar. Data mengenai jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) tidak tersedia. Namun demikian, Bank Indonesia (2017) melaporkan di tahun 2015, jumlah BMI yang mengirimkan remitan mencapai 3,5 juta orang. Jumlah sebenarnya kemungkinan melampaui jumlah tersebut dikarenakan banyak BMI yang mengirimkan remitan melalui jalur informal.

Gambaran lain dari buruh migran Indonesia adalah dominasi perempuan (BNP2TKI, 2017). Hal tersebut disebabkan permintaan terbesar buruh migran dari Indonesia adalah sektor domestik yang identik dengan perempuan. Selanjutnya, eksistensi buruh migran perempuan dapat dinyatakan sebagai bukti partisipasi perempuan dalam pembangunan di Indonesia, utamanya sehubungan dengan pengiriman remitan. BNP2TKI (2017) mencatat bahwa pengiriman remitan di tahun 2016 mencapai 8,85 Milyar USD dan menjadi pemasukan negara terbesar kedua di sektor nonmigas.

Tingginya kontribusi remitan terhadap pendapatan negara mendorong beberapa negara berkembang menjadikan

pengiriman buruh migran sebagai strategi temporal untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakterediaan tenaga kerja (Chan, 2014). Penelitian terhadap 71 negara berkembang membuktikan bahwa keberadaan 10% penduduk yang bekerja sebagai buruh migran internasional dapat menurunkan 2,1% tingkat kemiskinan. Selanjutnya, peningkatan remitan sebesar 10% perkapita dapat menurunkan 3,5% tingkat kemiskinan (Adam & Page, 2005).

Kontribusi remitan yang dikirimkan oleh para buruh migran juga dapat dilihat dalam konteks mikro. Secara langsung, remitan terbukti meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan melalui peningkatan aktivitas konsumtif dan produktif. Selanjutnya, peningkatan aktivitas ekonomi para keluarga buruh migran berpotensi mendorong dinamika ekonomi di daerah asal melalui penciptaan lapangan kerja baru (Primawati, 2011; Aeni, 2016).

Namun demikian, strategi pengentasan kemiskinan melalui pengiriman buruh migran, khususnya perempuan juga memiliki kelemahan. Chan (2014) menyatakan bahwa menggantungkan pemasukan negara melalui remitan membuat beban buruh migran semakin berat. Mereka tidak hanya menjadi penopang kehidupan bagi diri mereka sendiri dan keluarga, melainkan juga terbebani tanggung jawab ekonomi masyarakat dan negara.

Kabupaten Pati adalah salah satu wilayah dengan jumlah buruh migran tinggi, di tingkat Jawa Tengah, bahkan secara nasional. BNP2TKI (2016) menyatakan bahwa Kabupaten Pati

menduduki peringkat ke-19 kabupaten/kota yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Regional Jawa Tengah, Kabupaten Pati menduduki peringkat kelima setelah Kabupaten Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, dan Kendal. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, persentase buruh migran di Kabupaten Pati sebesar 0,1% dari total penduduk Kabupaten Pati di tahun tersebut. Walaupun memiliki persentase yang relatif kecil, kontribusi buruh migran terhadap pembangunan di Kabupaten Pati patut dipertimbangkan. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah menggambarkan persebaran buruh migran perempuan Kabupaten Pati serta kondisi kemiskinan di daerah dengan jumlah buruh migran terbanyak dan tersedikit.

TINJAUAN PUSTAKA

Buruh Migran Perempuan

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) (2005) mendefinisikan buruh migran sebagai seseorang yang terlibat atau dilibatkan dalam suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah di negara lain. Siddiqui (2012) mendeskripsikan buruh migran sebagai perpindahan orang dari negara asal ke negara lain dengan tujuan bekerja. Adapun buruh migran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: buruh migran jangka pendek; buruh migran lintas regional, dan buruh migran jangka panjang (diaspora). Apabila definisi tersebut dikaitkan dengan perempuan, definisi buruh migran perempuan adalah perempuan yang berpindah dari negara asalnya ke negara lain dalam periode tertentu dengan tujuan bekerja.

Kemiskinan

Hingga saat ini tidak ada definisi kemiskinan yang bersifat universal dan dapat diterapkan di semua wilayah. Joseph Rowntree Foundation (JRF) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dimana sumber daya yang dimiliki oleh seseorang tidak mencukupi kebutuhan minimum, termasuk kebutuhan berpartisipasi sosial (JRF, 2014). Selaras dengan definisi tersebut, Isdijoso dkk (2016) menambahkan faktor yang berkaitan dengan kemiskinan adalah pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penggunaan aset ekonomi, dan akses informasi.

Berdasarkan konsepnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut (BPS, 2016). Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar untuk kemiskinan absolut disusun berdasarkan kondisi suatu negara dan distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk pada periode tertentu (BPS, 2016).

Kemiskinan absolut direpresentasikan dalam bentuk garis kemiskinan. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun nonmakanan, meliputi: pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan (BPS, 2016). Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan global sebesar 1,25 USD (JRF, 2014; BPS, 2016),

sedangkan di Indonesia, garis kemiskinan pada bulan Maret 2016 sebesar Rp 354.346,00 (BPS, 2016). Terdapat perdebatan konsep kemiskinan manakah yang paling tepat untuk mengukur konsep kemiskinan. Namun demikian, konsep kemiskinan absolut dianggap lebih baik karena dapat digunakan untuk menilai efek dari kebijakan kemiskinan antar waktu. Selain itu juga bisa digunakan untuk membandingkan kemiskinan antarnegara dengan garis kemiskinan absolut yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan jenis data adalah data sekunder. Sumber data utama berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati berupa Data Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pati periode tahun 2014-2016. Sumber data yang lain adalah data kemiskinan yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati. Data kemiskinan bersumber dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2016. Data tersebut merupakan hasil survei terhadap 40% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah secara nasional. Selanjutnya hasil survei tersebut dibagi dalam empat kelompok dimana kelompok pertama dan kedua digunakan sebagai data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut selanjutnya diolah secara deskriptif dan hasilnya dianalisis dengan diperkuat dengan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persebaran Buruh Migran Perempuan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten

Pati melaporkan adanya fluktuasi jumlah pengiriman buruh migran dari Kabupaten Pati. Tahun 2014, jumlah buruh migran yang berangkat bekerja di luar berjumlah 1.806 BMI. Pada tahun 2015, terdapat penurunan pengiriman pekerja migran sebesar 12,68%, sehingga pekerja migran yang diberangkatkan dari Kabupaten Pati berjumlah 1.577 BMI. Sementara itu, di tahun 2016, terjadi peningkatan dengan jumlah 1.976 BMI dan merupakan yang tertinggi selama periode 2014-2016.

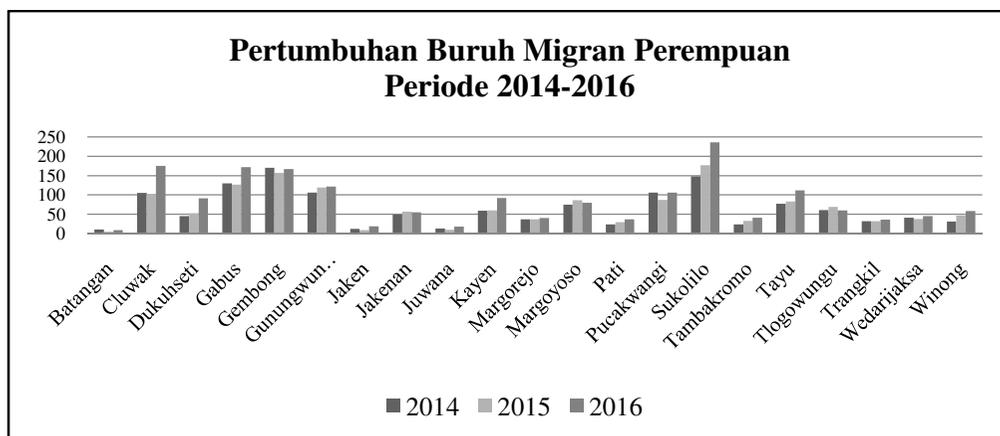
Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar buruh migran yang berasal dari Kabupaten Pati adalah perempuan. Bahkan terdapat kecenderungan peningkatan persentase pengiriman buruh migran perempuan. Pada tahun 2014, persentase buruh migran perempuan di Kabupaten Pati adalah 75,08%. Pada tahun 2016, persentase tersebut meningkat menjadi 89,62% dengan jumlah pekerja migran perempuan mencapai lebih dari 1400 perempuan dengan pertumbuhan sekitar 24%.

Selaras dengan data nasional, tingginya persentase buruh migran perempuan di Kabupaten Pati berkaitan dengan permintaan dari negara tujuan yang didominasi oleh sektor domestik, seperti pekerja rumah tangga dan perawat anak/jompo. Selama periode 2014-2016, hampir seluruh buruh migran perempuan dari Kabupaten Pati bekerja dalam sektor

domestik dan jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun.

Labadie-Jackson (2008) menyatakan bahwa permintaan pekerja domestik yang tinggi merupakan akibat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di negara maju. Namun di lain pihak, para perempuan tersebut masih dibebani oleh fungsi domestik dan pengasuhan anak. Oleh karenanya, solusi yang dilakukan adalah memperkerjakan perempuan, utamanya berasal dari negara-negara berkembang untuk mengambil alih tugas-tugas tersebut.

Permintaan tertinggi buruh migran perempuan dari Kabupaten Pati berasal dari Negara Taiwan dengan persentase di tahun 2016 sebesar 62,45%. Selain Taiwan, Hongkong dan Singapura juga menjadi destinasi utama para buruh migran perempuan dengan persentase 18,46% dan 12,08%. Kondisi ini berbeda dengan data penempatan BMI yang menempatkan Malaysia, bersama dengan Taiwan dan Negara Timur Tengah sebagai destinasi utama para buruh migran (BNP2TKI, 2017). Buruh migran perempuan dari Kabupaten Pati berasal dari 21 kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki jumlah buruh migran perempuan lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Pertumbuhan buruh migran perempuan di Kabupaten Pati ditunjukkan oleh Gambar 1.

**Gambar 1.**

Pertumbuhan Jumlah Buruh Migran Perempuan Perkecamatan

Sumber : Dinsosnakertrans, 2015-2017

Berdasarkan Gambar 1 dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Sukolilo, Gembong, dan Gabus merupakan kantong buruh migran perempuan di Kabupaten Pati. Untuk Kecamatan Batangan, Jaken, dan Juwana merupakan kecamatan dengan persebaran buruh migran paling sedikit.

Pada tahun 2014, jumlah buruh migran perempuan terbanyak ditemukan di Kecamatan Gembong mencapai 12,5% dari total seluruh buruh migran di Kabupaten Pati diikuti Kecamatan Sukolilo dan Gembong dengan persentase yaitu 10,91% dan 9,59. Pada tahun 2015, Kecamatan dengan persentase pengiriman buruh migran perempuan tertinggi adalah Kecamatan Sukolilo (12,47%), diikuti oleh Kecamatan Gembong dan Gabus dengan persentase 11,06% dan 8,95%. Pada tahun 2016, Kecamatan Sukolilo masih menjadi kecamatan dengan persentase pengiriman buruh migran perempuan tertinggi (13,33%). Setelah Kecamatan Sukolilo, terdapat Kecamatan Cluwak dengan persentase 9,88% dan diikuti

Kecamatan Gabus dengan persentase 9,71%.

Selain, kecamatan dengan persentase pengiriman buruh migran perempuan tertinggi, terdapat kecamatan dengan pengiriman buruh migran terendah. Pada tahun 2014, persentase terendah pengiriman buruh migran perempuan di Kabupaten Pati berada di Kecamatan Batangan sebesar 0,81%. Kecamatan lain yang juga memiliki persentase pengiriman buruh migran perempuan rendah adalah Kecamatan Jaken dan Juwana dengan persentase masing-masing 0,88% dan 0,96%. Kondisi yang sama terjadi di tahun 2015, dimana ketiga kecamatan merupakan kecamatan dengan persentase terendah pengiriman buruh migran perempuan. Pada tahun 2016, Batangan masih menjadi kecamatan dengan persentase pengiriman buruh migran perempuan terendah. Hal yang menarik adalah persentase pengiriman buruh migran perempuan dari Kecamatan Jaken meningkat hingga hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Buruh Migran Perempuan dan Kemiskinan di Kabupaten Pati

Migrasi lintas negara dan kemiskinan memiliki hubungan sebab akibat yang bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi (Adam & Page, 2005). Migrasi lintas negara dan remitan dapat mengurangi kemiskinan, namun kemiskinan juga merupakan salah satu alasan individu melakukan migrasi internasional. Pembahasan berikut akan menampilkan gambaran kemiskinan di Kabupaten Pati, khususnya kecamatan dengan persentase pengiriman buruh migran perempuan tertinggi dan terendah. Kecamatan dengan pengiriman buruh migran perempuan tertinggi diwakili oleh Kecamatan Sukolilo, Gabus, dan Gembong, Cluwak, dan Gunungwungkal sedangkan kecamatan dengan pengiriman buruh migran terendah terwakili oleh Kecamatan Juwana, Batangan, Jaken, Trangkil, dan Pati.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pati di tahun 2016 adalah 11,65% dengan rata-rata pertumbuhan

periode 2012-2016 sebesar 0,49%. Angka tersebut lebih tinggi dari Rata-rata persentase penduduk miskin Jawa Tengah sebesar 13,27%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten kantong buruh migran lain, angka kemiskinan Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kendal dan Tegal, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Cilacap, Brebes, dan Banyumas (BPS Kab. Pati, 2017).

Kemiskinan di Kabupaten Pati menunjukkan kondisi yang beragam di tiap kecamatan. Berdasarkan data dari PBDT, persentase keluarga miskin di tiap kecamatan di Kabupaten Pati berkisar antara 13,11 – 44,10% dari total keluarga di tiap kecamatan dan rata-rata sebesar 33,06%. Persentase keluarga miskin tertinggi ditemukan di Kecamatan Pucakwangi mencapai persentase 44,10%, sedangkan persentase terendah berada di Kecamatan Pati dengan 13,11%. Gambaran kemiskinan kecamatan dengan jumlah buruh migran perempuan tertinggi dan terendah ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Persentase Keluarga Miskin di Kecamatan dengan Jumlah Buruh Migran Perempuan Tertinggi dan Terendah Tahun 2016

Kecamatan	Keluarga Prasejahtera (KK)	Total Keluarga/kecamatan	Persentase Keluarga Miskin (%)
Sukolilo	11.765	28.951	40,64
Gabus	5.604	19.861	28,22
Gembong	5.107	14.782	34,55
Cluwak	6.970	16.118	43,24
Gunungwungkal	4.639	12.269	37,81
Jaken	6.740	15.572	43,23
Juwana	7.158	29.704	24,10
Batangan	5.918	15.006	39,44
Trangkil	6.479	20.878	31,03
Pati	4.237	32.326	13,11

Sumber : Data Kemiskinan PBDT diolah, 2017

Rata-rata persentase keluarga miskin di kecamatan dengan konsentrasi buruh migran perempuan tinggi adalah 36,89%. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan kecamatan dengan konsentrasi buruh migran rendah, yaitu 30,18%. Hal tersebut dapat menjadi indikasi kemiskinan sebagai salah satu penyebab migrasi lintas negara yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Pati. Kemiskinan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal individu. Korelasi antarfaktor tersebut menyebabkan individu mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Sebagai akibatnya, individu cenderung untuk mencari strategi lain untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Salkiah dan Amini (2016) menyatakan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan, kepemilikan lahan, dan pendapatan yang rendah bersama dengan jumlah tanggungan keluarga yang besar meningkatkan keinginan para perempuan untuk melakukan migrasi internasional.

Lebih lanjut, hal tersebut juga menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian keluarga dan selanjutnya meningkatkan posisi tawar mereka dalam rumah tangga dan masyarakat. Remitan yang dikirimkan oleh para buruh migran perempuan kepada keluarga di daerah asal menyebabkan perubahan dinamika keluarga migran, dimana para buruh migran perempuan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi serta peran dalam pengambilan keputusan, utamanya dari anggota keluarga laki-laki (Rahman, 2009);

Namun demikian, pengamatan terhadap persentase kemiskinan di tiap

kecamatan yang tercantum di Tabel 1 menunjukkan bahwa Salah satu kecamatan dengan konsentrasi buruh migran perempuan tinggi memiliki persentase keluarga miskin yang rendah, yaitu Kecamatan Gabus dengan persentase 28,22%. Kecamatan Gabus telah sejak lama dikenal sebagai kantong utama pengiriman buruh migran perempuan di Kabupaten Pati. Keberadaan buruh migran di Kecamatan Gabus terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Hal tersebut selaras dengan dengan penelitian oleh Dibyantoro dan Alie (2014) bahwa terdapat korelasi positif dengan lama menjadi buruh migran dengan besarnya pengiriman remitan. Remitan tersebut memiliki dua fungsi, yaitu ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, remitan digunakan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan, sedangkan secara sosial, remitan mampu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, Kecamatan Jaken yang memiliki persentase keluarga miskin tinggi memiliki jumlah buruh migran perempuan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan migrasi lintas negara bukan lah strategi yang dipilih oleh masyarakat Kecamatan Jaken untuk memenuhi kebutuhan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Buruh migran dari Kabupaten Pati didominasi oleh perempuan dengan pertumbuhan sekitar 24%. Mereka tersebar di 21 kecamatan dengan konsentrasi tertinggi selama periode

2014-2016 adalah Kecamatan Sukolilo dan kecamatan dengan konsentrasi terendah berada di Kecamatan Batangan. Negara tujuan utama para buruh migran adalah Taiwan dengan jenis pekerjaan utamanya di sektor domestik. Analisis terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kecamatan dengan konsentrasi buruh migran perempuan tinggi memiliki persentase keluarga miskin lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan dengan konsentrasi buruh migran perempuan yang rendah. Hal ini menunjukkan indikasi kemiskinan merupakan salah satu pemicu keputusan menjadi buruh migran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah pengiriman buruh migran dapat menjadi salah satu strategi untuk penanggulangan kemiskinan melalui sosialisasi pengelolaan dana remitan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan dan daerah asal.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, N. (2016). *The Effect of Migration on Transnational Households' Wellbeing (Evidence from women migrant workers from Pati District, Indonesia)*. Thesis. Magister of Development, Rural Development and Gender. Velp: Van Hall Larenstein.

Adam, R. H., Page, J. (2005). Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in

Developing Countries?. *World Development*, 33(10),1645-69.

Badan Pusat Statistik. (2016). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2017). Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. 2017. Tersedia di http://www.bi.go.id/seki/tabel/TAB_EL5_30.pdf. Diakses pada 20 Oktober 2017

Bappeda Kabupaten Pati. (2017). *Pemutakhiran Basis Data Terpadu*. Pati: Bappeda

BNP2TKI. (2016). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: BNP2TKI

BNP2TKI. (2017). *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Agustus Tahun 2017*. Jakarta: BNP2TKI.

Chan, C. (2014). Gendered Morality and Development Narratives: The case of female labor migration from Indonesia. *Sustainability*.6. 6949-72. Tersedia di www.mdpi.com/journal/sustainability. Diakses 18 Juni 2016

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2015). *Rekapitulasi CTKI Kabupaten/Kota Pati 01 Januari – 30 Desember 2014*. Pati: Disnakertrans

2016. *Rekapitulasi CTKI Kabupaten/Kota Pati 01 Januari – 30 Desember 2015*. Pati: Disnakertrans.

- .
2017. *Rekapitulasi CTKI Kabupaten/Kota Pati 01 Januari – 30 Desember 2016*. Pati: Disnakertrans.
- Dibyantoro, B., Alie, M. M. (2014). Pola Penggunaan Remitan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta pengaruhnya terhadap perkembangan Daerah Asal. *Jurnal Teknik PWK*, 3(2), 319-332.
- Ellis, F. (2012). *Rural livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., Akhmadi. (2016). *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. Kertas Kerja. Jakarta: SMERU.
- Joseph Rowntree Foundation. (2014). *A Definition of Poverty*. JRF Programme Paper. Tersedia di <https://www.jrf.org.uk/report/definition-poverty>. Diakses pada tanggal 5 November 2017.
- Labadie-Jackson, G. (2008). Reflection on Domestic Work and the Feminization of Migration. *Unknown*, 31(67), 67-90.
- Mukbar. D. (2009). *Kebijakan Terkait Migrasi dan Pola Migrasi*. Kertas Kerja. Bandung: Akatiga
- Primawati, A. (2011). *Remitan Sebagai Dampak Migrasi Pekerja ke Malaysia*. *Sosiokonsepsia*, 16(2), 209-220.
- PBB. (2005). *The International Convention of Migrant Workers and Its committee*. Fact Sheet No. 24 (Rev 1). Geneva: United Nations. Tersedia di <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24rev.1en.pdf>. Diakses pada 7 September 2016
- Rahman, M. R. (2009). *Gender Dimensions of Remittances: A Study of Indonesian Domestic Workers in East and Southeast Asia*. Bangkok: UNIFEM.
- Salkiah, B., Amini, R. (2016). Analisis Determinan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Melakukan Migrasi Internasional (Studi kasus di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara). *Jurnal Pendekar*. 1(2), 117-125.
- Siddiqui, T. (2012). *Impact of Migration on Poverty and Development*. Working Paper 2. Brighton: University of Sussex.
- Wilsonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geografi*, 23(2), 167-180.

BIODATA PENULIS

Nurul Aeni, lahir 24 Agustus 1984 di kota Blora Jawa Tengah. Master Pembangunan Desa dan Gender didapatkan dari Van Hall Larenstein Applied University. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati.